

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang berjajar di seluruh wilayahnya dan menjadikan kebudayaan di Indonesia sangat beragam. Perbedaan merupakan suatu keniscayaan di bumi Indonesia. Selain tanahnya yang subur, letak geografis Indonesia sangatlah strategis hingga menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan dunia pada beberapa abad lalu.

Tionghoa<sup>1</sup> adalah salah satu dari sekian banyak etnis yang datang dan menetap di Indonesia. Kedatangan mereka tentunya tak sekadar mencari penghidupan saja, karena secara tidak langsung mereka membawa budaya yang sebelumnya ia anut dari tanah kelahirannya. Bahkan mereka juga menyebarkan agama yang dianutnya. Hal ini menjadikan Indonesia semakin majemuk, baik dalam Agama, budaya, bahasa dan adat-Istiadat.

Kehidupan masyarakat Tionghoa sudah ada sejak abad 14 Masehi, hal ini ditandai dengan adanya ekspedisi Laksamana Haji Muhamad Cheng Hoo berkeliling dunia untuk membuka jalur perdagangan dengan menjual sutra dan keramik. Bahkan, Cheng Hoo pun menginjakkan kaki di pulau Jawa. Sejak

---

<sup>1</sup> Saya menyebutnya dengan sebutan Tionghoa, tata bahasa yang menyebut 'orang Cina' itu tendensi negatif dan merendahkan. Seperti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru dengan mendiskriminasi masyarakat Tionghoa, yang ia sebut 'orang Cina'.

terjadinya ekspedisi itu, berangsur-angsur masyarakat Tionghoa berdatangan dan membangun pecinan di beberapa daerah di Jawa.<sup>2</sup>

Hal ini ditegaskan pula dengan adanya kontrak perdagangan dengan masyarakat pribumi, dengan barang dagangan mulai dari porselen, kain sutera, hingga manik-manik.<sup>3</sup> Sejarah membuktikan bahwa orang Tionghoa telah lama hidup dan berkembang di Indonesia serta membentuk kehidupan yang sesuai dengan tradisi yang dibawanya bersama tradisi-tradisi lain yang ada di sekitarnya.<sup>4</sup>

Dilihat secara historis, pemerintah Hindia Belanda membuat politik pembagian golongan di mana penduduk Hindia Belanda dibedakan menjadi tiga golongan: golongan Eropa, golongan Timur asing (Tionghoa, Arab, India), dan golongan pribumi. Pemerintah Hindia Belanda melihat potensi dan keahlian orang Tionghoa dalam berdagang dan menjadikannya sebagai mitra dagang sekaligus perantara untuk menghubungkan antara pedagang Belanda dan pedagang Pribumi. Sehubungan dengan keahliannya dalam berdagang dan manfaat yang didapat dengan keberadaannya, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan *privilege* kepada orang Tionghoa dengan menjadikannya sebagai golongan yang

---

<sup>2</sup>Artikel “Menguak Tabir Sejarah Bandung China Town”, diakses pada hari Jumat 1 Maret 2019 [www.infobdg.com/v2/menguak-tabir-sejarah-bandung-china-town/amp](http://www.infobdg.com/v2/menguak-tabir-sejarah-bandung-china-town/amp).

<sup>3</sup> Sedyawati, et.al, *Tuban Kota Pelabuhan di Jalan Sutra* (Jakarta; CV. Putra Sejati Raya, 1997), hlm. 28.

<sup>4</sup> Onghokham, *Rakyat dan Negara* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 29.

setara dengan orang Hindia Belanda. Kebijakan ini diambil karena kebutuhan pragmatis Hindia Belanda dalam melakukan aktivitas perdagangannya.<sup>5</sup>

Keberadaan masyarakat Tionghoa tidak bisa diabaikan terutama dalam aspek ekonomi. Orang Tionghoa yang datang ke Nusantara pada umumnya adalah para pedagang, petani, pandai besi, tukang kayu, nelayan, dan buruh-buruh pekerja. Para pedagang umumnya pedagang perantara yang hidup dengan hemat dan bekerja dengan rajin. Masalah penguasaan ekonomi oleh golongan Tionghoa tidak dapat dipisahkan dengan latar belakang sejarah kehidupan mereka yang sejak awal kedatangannya telah banyak bergerak dibidang perdagangan.<sup>6</sup>

Namun di balik keberagamannya tersebut tentunya rentan terjadi konflik karena berbagai perbedaan budaya termasuk pada aspek sosial dan ekonomi. Hal ini tentunya dimanfaatkan oleh pelbagai pihak demi kepentingannya. Salah satunya pada tahun 1740 terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap etnis Tionghoa di Kota Batavia (Sekarang menjadi Jakarta) yang dimotori oleh VOC.<sup>7</sup>

Akibat dari pembantaian tersebut, etnis Tionghoa akhirnya menyebar secara luas ke berbagai daerah. Bahkan pada saat bersamaan, orang Tionghoa sengaja didatangkan oleh pemerintah Hindia-Belanda karena kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor terutama perkebunan. Bahkan Pemerintah Hindia-Belanda mengakui keberadaan warga etnis Tionghoa karena sangat berperan penting

---

<sup>5</sup> Artikel "Orang Tionghoa Dalam Sejarah Nusantara dan NKRI", diakses pada 27 April 2020 dari [https://www.academia.edu/36183537/ORANG\\_TIONGHOA\\_DALAM\\_SEJARAH\\_NUSANTARA\\_DAN\\_NKRI](https://www.academia.edu/36183537/ORANG_TIONGHOA_DALAM_SEJARAH_NUSANTARA_DAN_NKRI).

<sup>6</sup> Siswono Yudho Husodo. *Warga Baru: Kasus Cina di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985), hlm. 74.

<sup>7</sup> Rusopo, *Menjadi Jawa, (orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa)*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), hlm. 2.

sebagai perantara hubungan antara pemerintah Hindia-Belanda dengan warga pribumi.<sup>8</sup>

Terlepas dari berbagai persoalan dan pola diskriminasi rasial yang dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda, masyarakat etnis Tionghoa tak kenal lelah dan memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Demikian halnya asumsi yang berkembang dalam masyarakat luas bahwa transaksi ekonomi itu dikuasai oleh etnis Tionghoa. Benar atau tidaknya, asumsi tersebut sudah menjadi pendapat mapan yang hidup dalam masyarakat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa posisi-posisi strategis dalam ekonomi dipegang oleh orang-orang Tionghoa. Contoh konkretnya terjadi di kota Sukabumi. Mereka menguasai berbagai toko, dimulai dari toko mas, toko pakaian, sampai toko elektronik. Bukti-bukti inilah yang mengokohkan pandangan khalayak bahwa orang-orang Tionghoa-lah yang menguasai perekonomian.

Menurut Irman, pendiri Paguyuban Kipahare<sup>9</sup>, dalam diskusi yang bertema “5w + 1h Sukabumi” pada tanggal 20 Januari 2019 di Cisaat, menyatakan bahwa Masyarakat Tionghoa yang minoritas di Sukabumi memiliki perkembangan yang sudah cukup lama. Keberadaan mereka sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pribumi yang berada di sekitar mereka. Pembauran budaya antar masyarakat pribumi dan masyarakat Tionghoa di Kota Sukabumi begitu lekat dengan berbagai macam ritual keagamaan, budaya, arsitektur, serta

---

<sup>8</sup> Artikel “Asal-Usul dan Politik Kata Pribumi”, diakses pada 17 April 2019 dari <https://tirto.id/asal-usul-dan-politik-kata-pribumi-cyxT.com>

<sup>9</sup> Paguyuban Kipahare adalah perkumpulan peneliti dan akademisi yang kajiannya berfokus pada sejarah dan warisan budaya di Sukabumi.

cara hidup. Hal ini membuktikan bahwa adanya masyarakat Tionghoa semakin memperkaya budaya di Kota Sukabumi.

Irman memaparkan pula bahwa perjalanan sejarah Kota Sukabumi tidak bisa dilepaskan dari aktivitas ekonomi masyarakat Tionghoa. Pada tahun 1842, perkebunan Sinagar di Cibadak sudah dikelola oleh masyarakat Tionghoa bernama Tan Soeij Liong. Menjelang akhir kekuasaan Belanda, terdapat 50 perkebunan swasta dan 15 penggilingan padi di Kota Sukabumi dikuasai oleh masyarakat Tionghoa.

Dalam artikelnya berjudul “Refleksi: Nasionalisme Tionghoa Sukabumi Pada Masa Revolusi Kemerdekaan”, Irman menjelaskan bahwa ulama terkenal yang mensyiarkan agama Islam di Kota Sukabumi bernama Raden Qudratullah yang dimakamkan di Pelabuhan Ratu adalah orang Tionghoa.<sup>10</sup>

Di Kota Sukabumi, tempat peribadatan seperti Vihara, Gereja, dan Masjid cukup berdekatan. Hal ini mengindikasikan tingginya toleransi dalam beragama. Karena dengan begitu, keharmonisan dalam beragama akan terbangun. Bahkan, siapapun masyarakat itu, apapun agamanya boleh memasuki tempat peribadatan di Kota Sukabumi. Penulis melihat kejadian ini, terutama di Vihara dan Gereja itu dipenuhi oleh orang-orang yang notabene masyarakat Tionghoa.

---

<sup>10</sup> Irman, *Refleksi: Nasionalisme Tionghoa Sukabumi Pada Masa Revolusi Kemerdekaan*. <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/44206-Refleksi-Nasionalisme-Tionghoa-Pada-Masa-Revolusi-Kemerdekaan>, diakses pada 3 Maret 2019.

dan bagaimana hubungan sosial antara etnis Tionghoa, dengan masyarakat pribumi. Apakah ada ketegangan, konflik, terlebih karena perbedaan baik secara fisik maupun budaya yang berkembang antar masyarakat.

Secara sosial, memang tampak ada jarak antara orang Tionghoa dan orang pribumi. Hal ini ada kaitannya dengan ungkapan “*talk less do more*”, yang mengandung arti sedikit berbicara banyak bekerja, yang diyakini oleh masyarakat Tionghoa.

Menurut Daud Ade Nurcahyo dalam penelitiannya mengenai “Kebijakan Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa”<sup>11</sup>, adanya jarak antara etnis Tionghoa dengan etnis pribumi merupakan konsekuensi logis dari berbagai kebijakan pada masa orde baru yang dinahkodai oleh Presiden Soeharto. Contohnya, kebijakan yang berisi tentang larangan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1976.

Walaupun berbagai kebijakan yang dibuat oleh Soeharto cenderung mendiskreditkan etnis Tionghoa, keberadaan masyarakat Tionghoa memberikan dampak besar terhadap perekonomian bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan Leo Suryadinata bahwa pertumbuhan ekonomi pada masa orde baru meningkat. Hal ini merupakan implikasi dari kebijakan Soeharto yang melarang menampakkan kegiatan keagamaan, serta adat istiadat masyarakat

---

<sup>11</sup>Daud Ade Nurcahyo, “Kebijakan Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa”, [https://repository.usd.ac.id/4471/2/111314013\\_full.pdf](https://repository.usd.ac.id/4471/2/111314013_full.pdf), diakses pada 18 Pebruari 2019.

Tionghoa, supaya lebih terfokus pada aktivitas dalam rangka menumbuhkan perkonomian.<sup>12</sup>

Di balik peliknya persoalan yang menghadang masyarakat Tionghoa seperti perbedaan agama, budaya, dan suku, mereka mempuyai keunggulan dalam ketekunan bekerja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa etnis Tionghoa memiliki ketekunan, keuletan, gaya hidup yang hemat, memiliki etos kerja tinggi tentunya dalam hal ekonomi. Ini merupakan fakta yang sangat menarik untuk diteliti dengan serius.

Berangkat dari fenomena di atas, penulis tertarik meneliti faktor penting yang mempengaruhi etos kerja masyarakat Tionghoa. Dengan fokus pada masyarakat Tionghoa di Sukabumi yang penduduknya 96% adalah Muslim, penelitian ini mengkaji faktor apa yang memainkan peranan penting dalam tingginya etos kerja masyarakat Tionghoa. Penulis berasumsi bahwa etos kerja tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Tionghoa Sukabumi dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang mereka anut dan amalkan. Karena itu, skripsi ini menganalisis nilai-nilai agama Buddha apa yang mempengaruhi tingginya etos kerja masyarakat Tionghoa dengan subjek penelitian masyarakat Tionghoa jamaah Vihara Widhi Shakti Kota Sukabumi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang dijelaskan di atas, permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002). Hlm. 58-59).

- 1.2.1 Meskipun inferior secara kuantitas, masyarakat Tionghoa memiliki peran superior dalam perekonomian di Kota Sukabumi.
- 1.2.2 Aktivitas keberagamaan masyarakat Tionghoa sangat tinggi, dan berbanding lurus dengan kegiatan ekonomi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana etos kerja pada masyarakat Tionghoa di Kota Sukabumi?
- 1.3.2 Bagaimana nilai-nilai agama Budha mempengaruhi etos kerja masyarakat Tionghoa di Kota Sukabumi?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana etos kerja pada masyarakat Tionghoa di Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui hubungan etos kerja dan nilai agama pada masyarakat Tionghoa di Kota Sukabumi.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya terhadap studi sosiologis tentang masyarakat Tionghoa di Kota Sukabumi.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas supaya lebih bersemangat dalam bekerja dengan mencontoh etika masyarakat Tionghoa dalam bekerja tanpa menanggalkan prinsip-prinsip hidup keagamaan yang dianutnya.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Teori merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori diartikan pula sebagai serangkaian ide, gagasan, konsep, proposisi untuk menjelaskan suatu fenomena dengan merumuskan hubungan antara konsep dengan realita. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni nilai agama dan semangat kapitalisme dalam buku Max Weber berjudul "*The Protestant Ethics and Spirit of Capitalism*".

Karya Max Weber semakin memperkaya kajian sosiologi yang lebih berpusat pada kajian-kajian agama dan hubungannya dengan ekonomi. Max Weber menyebutkan bahwa agama adalah salah satu alasan utama perbedaan antara budaya barat dan timur, ia merelevansikan antara efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial dan pemikiran agama dan perbedaan karakteristik budaya barat.<sup>13</sup>

Dalam bukunya tersebut, Max Weber memusatkan perhatiannya pada nilai yang dipelajari dan dianut dalam ajaran Protestan memberikan motivasi sekaligus semangat untuk mempunyai kekayaan lebih—menjadi kapitalisme.

---

<sup>13</sup> Max Weber, *Sosiologi Agama*. (Yogyakarta: IRCiSoD Cet. 1) terj oleh Yudi Santoso, 2012. Hlm. 18

Weber menarik kesimpulan bahwa ajaran agama Protestan berperan penting dalam menghasilkan motivasi aktivitas yang pro kapitalis dan berorientasi pada kehidupan duniawi. Max Weber juga mendefinisikan bahwa semangat kapitalisme sebagai gagasan dan kebiasaan yang tentunya dapat mendukung pengajaran yang rasional terhadap keuntungan secara kalkulasi ekonomis.

Dalam pandangan Weber, kapitalisme berawal dari etika Protestan yang mengajarkan untuk hemat, rajin bekerja, disiplin sebagai bentuk pemujaan terhadap Tuhan. Selain daripada itu, etika Protestan sangat ketat sekali terhadap hidup santai dan bersenang-senang karena hal tersebutlah timbul semangat kapitalisme.

Etos kerja tersebut di sisi lain harus dibarengi dengan mental khusus yakni ditandai dengan hidup hemat, sederhana, rajin beribadah—asketik. Tapi etos kerja semacam semangat untuk bekerja, mencari penghidupan yang layak, disiplin menjadi syarat terpenting bagi terciptanya semangat kapitalisme.

Analisa Weber mengenai etika Protestan serta pengaruhnya dalam meningkatkan pertumbuhan kapitalisme menunjukkan pengertiannya mengenai pentingnya kepercayaan akan keagamaan dalam membentuk pola motivasi individu serta tindakan ekonominya.

Dikutip dari S. Gordon Reding, Weber menyatakan bahwa semangat kapitalisme mengandung komponen-komponen berikut:

1. Modal tetap yang diinvestasikan untuk memproduksi barang keperluan sehari-hari.

2. Organisasi kapital yang mempunyai buruh lepas, namun menjunjung tinggi disiplin.
3. Pemisahan modal bisnis dan anggaran rumah tangga.
4. Pembukuan dan laporan rasional untuk keuntungan jangka panjang.<sup>14</sup>

Semangat kapitalisme, sebagaimana ungkapan Benjamin Franklin bahwa waktu adalah uang, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup harus pula meningkatkan produktivitas dan intensitas kerja. Semakin giat dan semakin banyak ia bekerja maka akan semakin banyak pula pendapatan dan pencapaian yang dihasilkan.

Weber menilai produktivitas kerja berhubungan dengan konsep ‘panggilan’ dalam teologi Kristen Protestan. Panggilan menurut Protestan (yang diwakili oleh Martin Luther, Calvin dan Richard Baxter) bukanlah dengan kehidupan monastis (membiara) yang bisa berarti penolakan kewajiban di dunia ini sebagai hasil egoisme diri, dengan tindakan menyingkir dari kewajiban-kewajiban di dunia. Sebaliknya, panggilan yang dimaksud adalah sesuatu yang harus diterima sebagai peraturan keilahian, peraturan yang harus dipatuhi oleh manusia. Maka, kerja dalam aspek panggilan adalah suatu tugas yang digariskan Tuhan.<sup>15</sup>

Tesis Weber tersebut kemudian banyak mengilhami peneliti-peneliti lainnya untuk meneliti hubungan antara agama atau sistem kepercayaan dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi suatu bangsa. Seperti, Robert N. Bellah dan

---

<sup>14</sup> S. Gordon Redding, *Jiwa Kapitalisme Cina* (Cet. I; Jakarta: Abdi Tandur, 1994). Hlm. 9

<sup>15</sup> Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme* (Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Hlm. 127.

penelitiannya mengenai agama Tokugawa di Jepang dan S. Gordon Redding dengan penelitiannya mengenai kapitalisme Tionghoa.

Paradigma Weber inilah yang peneliti gunakan untuk mengkaji keterpaduan antara etos kerja dan nilai agama yang turut membentuk semangat untuk mencari penghidupan duniawi dan merupakan budaya daripada masyarakat Tionghoa di Sukabumi. Secar sederhana, pandangan Weber ini dimaksudkan sebagai kerangka teoritik untuk menjawab pertanyaan apakah semangat kerja masyarakat Tionghoa dilatarbelakangi oleh ajaran Budha yang mereka anut dna amalkan.

Ide dasar dari pemikiran Weber adalah nilai-nilai dalam agama dapat mempunyai pengaruh yang independen dalam semangat mencari penghidupan.<sup>16</sup> Jika ditinjau dengan memakai konsep Weberian, citra orang-orang Tionghoa yang mempunyai spirit mencari penghidupan yang tinggi distimulasi oleh etika dalam agama yang mereka anut. Setidaknya, kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Tionghoa di Kota Sukabumi menjadi sebab mereka penuh semangat dalam bekerja dan melakukan aktivitas ekonomi mereka.

---

<sup>16</sup> Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 238.

**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**

